

ANALISIS KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN REFOCUSING KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK WUJUDKAN JAWA TIMUR OPTIMIS BANGKIT

Davina Monica Ilyas, Dinda Tiara Gisani, Marshanda Devi Noor Salsabila, Muhammad Akhdan Syafiq, Nadia Marcella, Asianto Nugroho, Spto Hermawan

Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia

e-mail : tiaragisani@student.uns.ac.id, asiantonugroho@staff.uns.ac.id,
sptohermawan_fh@staff.uns.ac.id

Abstract

This study aims to examine Tax Policy Analysis and Fuel Oil Refocusing to Make East Java Rise Optimistic. The type of method used in this study is a qualitative research method and library research (Library Research). Data analysis was carried out descriptively, secondary data based on the results of research on Tax Policy Analysis and Refocusing Fuel Oil Makes East Java Rise Optimism is then qualified, grouped, then analyzed carefully. The results of the study show that the central government is refocusing taxes in the form of tax reduction or exemption (tax relaxation) related to taxation issues and the availability of domestic funds to finance development and fuel price increases aimed at anticipating inflation which will cause a national economic crisis. In realizing the optimism of Rising East Java, there are several things that must be realized to build commitment and joint action programs so that inflation control can be refreshed in various forms of economic protection and social protection, can accommodate the impact of the increase in fuel prices. prices and conditions in East Java Province that are conducive and have resilience to fluctuations in staple food prices, inflation, and increasing poverty rates.

Keywords : Analysis, Policy, Tax, BBM.

Abstrak

Kajian ini bertujuan mengkaji Analisis Kebijakan Perpajakan dan Refocusing Bahan Bakar Minyak untuk Membuat Jawa Timur Optimis Bangkit. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data dilakukan secara deskriptif, data sekunder berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kebijakan Perpajakan dan Refocusing BBM Membuat Optimisme Jawa Timur Bangkit kemudian dikualifikasikan, dikelompokkan, kemudian dianalisis secara cermat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah pusat melakukan refocusing pajak berupa pengurangan atau pembebasan pajak (relaksasi pajak) terkait masalah perpajakan dan ketersediaan dana dalam negeri untuk membiayai pembangunan dan kenaikan harga BBM yang ditujukan untuk mengantisipasi inflasi yang akan menyebabkan krisis ekonomi nasional. Dalam mewujudkan optimisme Jawa Timur Bangkit, ada beberapa hal yang harus diwujudkan untuk membangun komitmen dan program aksi bersama agar pengendalian inflasi dapat disegarkan dalam berbagai bentuk perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial, dapat mengakomodir dampak kenaikan

BBM. harga. harga dan kondisi di Provinsi Jawa Timur yang kondusif dan memiliki ketahanan (*resilience*) terhadap fluktuasi harga bahan pokok, inflasi, dan angka kemiskinan yang meningkat.

kata kunci : Analisis, Kebijakan, Pajak, BBM.

PENDAHULUAN

Dampak penyesuaian Bahan Bakar Minyak bersubsidi untuk jenis Petalite dan Solar sudah mulai dirasakan masyarakat dengan adanya kenaikan harga bahan pokok dan angkutan umum. Pemerintah diharapkan segera melakukan analisis kebijakan untuk mengantisipasi dampak tersebut, termasuk melakukan mitigasi dalam mengatasinya. Analisis kebijakan adalah proses atau kegiatan mensintesis informasi, termasuk hasil penelitian, mempelajari dinamika program yang berdampak pada masyarakat untuk menghasilkan rekomendasi pilihan desain kebijakan publik¹. Kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan pemerintah yang mempengaruhi atau mengarah pada tindakan individu dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Analisis kebijakan adalah teknik yang digunakan dalam administrasi publik untuk memeriksa dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan. Ini telah didefinisikan sebagai proses "menetapkan berbagai kebijakan dalam mengejar suatu tujuan." Dari definisi di atas dapat dirumuskan ciri-ciri dasar analisis kebijakan. *Pertama*, analisis kebijakan merupakan proses atau kegiatan "sintesis" informasi yang berarti integrasi berbagai informasi. Kegiatan utama analisis kebijakan adalah pengumpulan informasi secara sistematis dan penarikan kesimpulan logis dari informasi tersebut. Dengan demikian, analisis kebijakan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah. *Kedua*, analisis kebijakan adalah pengolahan lebih lanjut hasil penelitian agar siap digunakan dalam

pengambilan keputusan dan perancangan (*design*) kebijakan publik. Oleh karena itu, analisis kebijakan merupakan salah satu bentuk diseminasi hasil penelitian. *Ketiga*, keluaran (*output*) kebijakan berupa saran atau petunjuk operasional bahan pengambilan keputusan publik bagi pengambil keputusan kebijakan tertentu (*klien*). Oleh karena itu, analisis kebijakan harus disajikan secara jelas, ringkas, padat, lengkap, dan menyeluruh. *Keempat*, pengambil keputusan kebijakan publik (*pemerintah dan DPR*) dan kelompok kepentingan atas kebijakan pemerintah. *Klien* yang menggunakan analisis kebijakan bersifat spesifik².

Hal ini terkait langsung dengan keluaran (*output*) analisis kebijakan berupa saran kebijakan publik. *Kelima* adalah analisis kebijakan yang berorientasi pada *klien*. Ini adalah implikasi dari sifat analisis kebijakan yang menghasilkan saran keputusan *turnkey* untuk *klien* tertentu. Tanpa analisis kebijakan berorientasi *klien* tidak akan siap untuk digunakan. Ini berarti bahwa analisis kebijakan harus didasarkan atas dasar "dari, oleh, dan untuk *klien*". Analisis kebijakan hanya dilakukan ketika ada permintaan atau "masuk akal untuk menduga" bahwa *klien* membutuhkannya. Analisis kebijakan didorong oleh kebutuhan mendesak *kliennya (client's need push)*. Analisis kebijakan dapat disinergikan berorientasi pada program sistem perpajakan. Perpajakan adalah sistem pemungutan yang memberikan kewenangan penuh kepada *Wajib Pajak* untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem

¹ Williams, W. 1971. *Social Policy Research and Analysis*. American Elsevier Publishing Company, New York, USA, and Weimer, D.L. and A.R. Vining. 1989. *Policy Analysis: Concept and Practice*. Prentice Hall Inc. Englewoods, J.J., USA.

² Mangkoesoebroto, G. (1994). *Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau satu kesatuan yang terdiri dari unsur undang-undang perpajakan, kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan, yang satu sama lain saling berhubungan, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau sasaran memperoleh penerimaan pajak yang optimal bagi masyarakat. negara. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara, yaitu pajak yang dipungut dari masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, semakin besar pendapatannya³.

Refocusing pajak berupa pengurangan atau pembebasan pajak (*tax relaxation*) terkait masalah perpajakan dan ketersediaan dana dalam negeri untuk membiayai pembangunan yang masih jauh dari harapan. Tepatnya, Sabtu 3 September 2022, pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) atau menghapus subsidi BBM. Berbagai tanggapan atas kenaikan harga BBM pada pembahasan sebelumnya tidak menyurutkan langkah pemerintah. Petalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Harga solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. Sedangkan Pertamina non subsidi dibanderol Rp 14.500 dari sebelumnya Rp 12.500 per liter. Kenaikan harga BBM dari segi ekonomi, kenaikan harga BBM akan mendorong biaya produksi, dan mendorong inflasi (*cost push inflation*) yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah riil dan konsumsi rumah tangga. Kenaikan harga minyak akan berdampak pada kenaikan biaya produksi. Peningkatan produksi akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Akibatnya pasokan berkurang. Penurunan pasokan akan meningkatkan harga. Selain itu, kenaikan harga BBM juga dapat mendorong lahirnya industri ramah lingkungan dan sektor Energi Baru

Terbarukan (EBT). Sedangkan dampak negatif dari kenaikan BBM adalah kenaikan harga sehingga daya beli masyarakat menurun.

Kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan angka pengangguran yang tentunya akan meningkatkan angka kemiskinan Indonesia. Bahkan, per Maret 2022, BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan pascapandemi. Tingkat kemiskinan per Maret mencapai 9,54% atau 26,16 juta orang. Kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi pergerakan inflasi, karena merupakan akibat dari kenaikan harga BBM. BBM digunakan untuk konsumsi hampir di semua sektor, sehingga inflasi kita 17,11 persen. Maka pentingnya pengendalian harga energi menjadi catatan dari kami agar tidak berpengaruh pada inflasi. Kenaikan harga BBM juga dimaksudkan untuk memberikan peluang pengembangan bahan bakar gas dan energi alternatif lain, serta upaya konservasi energi. Selain itu, kesadaran untuk menghemat konsumsi BBM dan mengurangi ketergantungan terhadap BBM harus terus ditingkatkan.

Presiden RI Ir, Joko Widodo mengatakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) memicu lonjakan inflasi di sejumlah daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan inflasi saat ini. Selanjutnya, dampak kenaikan harga BBM mempengaruhi inflasi dan perekonomian Indonesia. Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) mendorong inflasi September 2022 mencapai 1,17 persen (m-to-m) atau 5,95 persen (y-on-y). Penyesuaian harga BBM juga berdampak pada sektor transportasi yang menyumbang inflasi bulan lalu sebesar 1,08 persen. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi yaitu penurunan harga barang secara umum dan terus menerus.

³ Damayanti, Theresia Woro dan Supramono. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Salatiga: Andi.

Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah dapat mengantisipasi inflasi dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Meminimalkan biaya, Mengefisienkan biaya internal, Melakukan inovasi dan variasi produk, Menaikkan harga, Meminimalkan biaya penyimpanan, Hidup hemat, dan Menyiapkan dana darurat dan Investasi. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak melakukan strategi. Berdasarkan keadaan tersebut, maka penulis akan membuat analogi dengan judul “Analisis Kebijakan Perpajakan dan Refocusing Bahan Bakar Minyak Wujudkan Jawa Timur Optimis Bangkit”.

METODOLOGI

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan riset kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kualitatif merupakan upaya untuk memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian berupa kata-kata tertulis atau wawancara dan perilaku yang diamati. Memilih metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif itu sendiri dapat dengan mudah menggali informasi yang lebih dalam terkait inti penelitian serta menyajikan data yang lebih rinci dan orisinal.

Data yang digunakan di dalam penelitian ini ialah menggunakan metode dokumentasi. Data yang ditemukan dalam proses penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan teknik content analysis (Analisis isi). Penelitian ini pula menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan menunjang informasi objek penelitian yang berbentuk buku, publikasi pemerintah, karya tulis atau jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian yakni tentang “Analisis Kebijakan Perpajakan dan Refocusing Kenaikan Bahan Bakar Minyak Wujudkan Jatim Optimis Bangkit”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengingat bahwa pembelian makanan mencapai sekitar 60% dari keseluruhan pengeluaran orang miskin, inflasi akan berdampak signifikan pada mereka. Dampak inflasi dapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Demikian pula kondisi penduduk Indonesia yang tahun ini tergolong masyarakat menengah, pada akhirnya akan menjadi masyarakat miskin baru jika pendapatannya tidak meningkat. Penghapusan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan premium, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% per April 2022, dan potensi kenaikan harga gandum di pasar global menjadi beberapa faktor yang akan turut menyumbang inflasi selain kenaikan biaya bahan bakar minyak dan makanan olahan akibat kenaikan harga minyak dunia. Urgensi untuk mengembangkan solusi kebijakan yang dapat digunakan pemerintah untuk memastikan stabilitas biaya bahan bakar. Strateginya secara bertahap beralih dari subsidi berbasis komoditas ke subsidi berbasis penerima manfaat untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.

Kebijakan perubahan subsidi energi ini dilakukan dalam kerangka sistem jaminan sosial yang luas. Program subsidi/bantuan berbasis sasaran yang tepat sasaran diharapkan dapat membuat pengelolaan subsidi energi lebih terarah dan berhasil mencapai tujuan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Subsidi BBM, LPG tabung 3 kilogram, dan listrik semuanya termasuk dalam kategori subsidi energi. Evolusi dari hipotesis ekonomi makro yang mendasarinya dan penetapan tingkat subsidi tetap untuk minyak petalite dan solar sangat memengaruhi arah sebenarnya dari subsidi energi yang berfluktuasi selama periode 2017–2020.

Pemerintah menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan program pengelolaan subsidi energi, antara lain (1) kesalahan inklusi dan eksklusi; (2) belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan subsidi

barang/komoditas; (3) harga jual minyak mentah dunia dan nilai mata uang rupiah yang tidak stabil; dan (4) terdapat kemungkinan risiko keuangan akibat tidak dilakukannya prosedur penyesuaian harga⁴. Pemerintah telah menganggarkan anggaran subsidi sebesar Rp. 206,9 triliun dalam APBN 2022. Pembiayaan ini dibagi menjadi Rp. 134 triliun untuk subsidi energi dan Rp. 72,9 triliun untuk subsidi non energi⁵. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelesaikan proses perubahan tujuan subsidi dari sebelumnya berbasis komoditas menjadi berbasis masyarakat saat ini.

Agar subsidi BBM lebih tepat sasaran, hal ini harus dibarengi dengan kemajuan teknologi proses operasional. Diperlukan strategi kebijakan BBM yang mengintegrasikan kepastian pasokan, strategi harga, target subsidi, serta mekanisme dan insentif. Menurut Laksanawan, Irnanda *Strategic Advisor dari Center for Research on Energy Technology and Innovation (CENTS)*, untuk meredam dampak kenaikan harga BBM terhadap perekonomian, inflasi bermasalah dan perdagangan nasional. Formulasi kebijakan mekanisme penetapan harga otomatis (APM) dalam menyetujui harga jual merupakan gambaran kebijakan BBM yang dapat dipilih. Kebijakan formula APM dimaksudkan sebagai alat untuk menstabilkan secara moderat harga bensin (bensin RON 95, bensin RON 97), dan berbagai jenis solar, dengan mengenakan berbagai tingkat pajak penjualan dan subsidi. Perubahan nilai jual eceran disebabkan oleh besarnya pajak dan subsidi dalam batas tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Ketentuan semacam ini diambil oleh Malaysia yang mengamankan BBM melalui pemberian insentif yang dialokasikan dari pajak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah daerah tak perlu ragu mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mengatasi masalah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Pemda bisa menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri, sehingga payung hukumnya jelas selama digunakan untuk menyelesaikan masalah akibat penyesuaian harga BBM. Realisasi APBD masih 47 persen, padahal kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Untuk itu, pemerintah daerah dapat menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD, yaitu dana transfer umum yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi permasalahan akibat penyesuaian harga BBM. Komponen anggaran APBD berupa dana 2 persen merupakan dana transfer umum yang masih berkisar Rp. 2,17 triliun, lalu Rp. 16,4 (triliun) pengeluaran tak terduga, Rp. 6,5 triliun telah digunakan. Artinya, masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum serta belanja tak terduga provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini menjadi pertimbangan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan kewenangan kebijakannya untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak penyesuaian BBM, seperti nelayan, tukang ojek, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di bidang perhubungan (transportasi), pemerintah daerah juga dapat membantu angkutan umum yang mengalami kenaikan tarif. Pemerintah Daerah dapat membantu UMKM dalam pembelian bahan

⁴ Laksanawan, Irnanda. "Urgensinya Strategi Kebijakan BBM yang Terintegrasi", Media Indonesia, 5 April 2022, hlm. 6.

⁵ Kementerian Keuangan RI, Buku II Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2022.

baku yang mengalami kenaikan akibat penyesuaian harga BBM. Angkutan umum juga bisa terbantu dengan menaikkan tarif, berapa bukan total kenaikan tarif, tapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu melalui subsidi. Selain itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan komponen anggaran lainnya yaitu belanja tak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing, seperti kenaikan bahan pangan. Misalnya, kenaikan harga bawang merah dapat membantu biaya transportasi sehingga harga bawang merah di pasar petani tetap sama. Kepala daerah harus mewaspadaikan inflasi, terutama terkait harga pangan karena pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah. Jika harga pangan naik, angka kemiskinan di wilayah tersebut juga akan mampu meningkatkan angka kemiskinan. Indonesia yang memiliki 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 Kelurahan dan 74.961 desa.

Eksistensi pemerintah pusat dan pemerintah daerah kompak dalam mengantisipasi gejolak masyarakat dalam menghadapi risiko kenaikan harga BBM. Artikel ini membuktikan bahwa telah diperoleh eksisting data yang ada bahwa salah satu lokasi penelitian adalah kebersamaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan provinsi Jawa Timur dalam menghadapi fluktuasi penyesuaian harga BBM.

1. Strategi Kebijakan Pemerintah Pusat.

Kebijakan perubahan subsidi energi ini dilakukan dalam kerangka sistem jaminan sosial yang luas. Program subsidi/bantuan berbasis sasaran yang tepat sasaran diharapkan dapat membuat pengelolaan subsidi energi lebih terarah dan berhasil mencapai tujuan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Subsidi BBM, LPG tabung 3 kilogram, dan listrik semuanya termasuk dalam kategori subsidi energi. Evolusi dari hipotesis ekonomi makro yang mendasarinya dan penetapan tingkat subsidi tetap untuk minyak petalite dan solar sangat

memengaruhi arah sebenarnya dari subsidi energi yang berfluktuasi selama periode 2017–2020. Pemerintah menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan program pengelolaan subsidi energi, antara lain: (1) kesalahan inklusi dan eksklusi; (2) belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan subsidi barang/komoditas; (3) harga jual minyak mentah dunia dan nilai mata uang rupiah yang tidak stabil; dan (4) terdapat kemungkinan risiko keuangan akibat tidak dilakukannya prosedur penyesuaian harga⁶.

Pemerintah telah menganggarkan anggaran subsidi sebesar Rp. 206,9 triliun dalam APBN 2022. Pembiayaan ini dibagi menjadi Rp. 134 triliun untuk subsidi energi dan Rp. 72,9 triliun untuk subsidi non energi⁷. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelesaikan proses perubahan tujuan subsidi dari sebelumnya berbasis komoditas menjadi berbasis masyarakat saat ini. Agar subsidi BBM lebih tepat sasaran, maka harus dibarengi dengan kemajuan teknologi proses operasional. Diperlukan strategi kebijakan BBM yang mengintegrasikan kepastian pasokan, strategi harga, target subsidi, serta mekanisme dan insentif. Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mendesak untuk segera dilaksanakan. Saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami tekanan fiskal yang cukup berat akibat alokasi subsidi BBM yang semakin meningkat. Harga konsumen BBM bersubsidi ditentukan oleh pemerintah, dan ditetapkan di bawah harga keekonomian yang seharusnya. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan subsidi untuk menutup selisih antara harga konsumen dan harga keekonomian.

Perlu dicermati bahwa pada semua alternatif kebijakan, konsumsi rumah tangga lebih rendah dari baseline, baik dalam jangka pendek maupun menengah. Hal ini karena konsumsi rumah tangga mengalami tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat diberlakukannya kenaikan harga premium. Tekanan datang langsung dari kenaikan harga komoditas, sedangkan

⁶ Laksanawan, Irnanda. Ibid

⁷ Kementerian Keuangan RI, . Ibid

tekanan tidak langsung datang dari penurunan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Sejalan dengan itu, konsumsi rumah tangga perlu menjadi perhatian utama pemerintah dalam menerapkan kebijakan penyesuaian harga premium. Selain dari sisi konsumsi, kenaikan harga premium juga akan berimbas pada penyesuaian di sisi produksi. Penyesuaian akan terjadi pada permintaan tenaga kerja dan tingkat upah, sehingga pendapatan rumah tangga juga akan terpengaruh. Disposable income yang berasal dari pendapatan rumah tangga yang telah dipotong pajak menunjukkan ukuran daya beli rumah tangga.

Penurunan volume konsumsi premium dalam jangka pendek masih berlanjut dalam jangka menengah. Hal ini terlihat dari akumulasi penurunan volume konsumsi premium dalam jangka menengah yang masih berada pada kisaran yang sama dengan jangka pendek. Artinya, volume konsumsi premium bisa ditekan sehingga nilainya tidak kembali seperti semula. Hal ini menjadikan kebijakan penyesuaian harga premium sebagai kebijakan ramah lingkungan karena dapat meningkatkan efisiensi konsumsi energi. Selama ini, harga bersubsidi telah mendistorsi harga pasar sehingga menyebabkan pemborosan konsumsi. Kenaikan harga premium juga akan memberikan efek substitusi, menyebabkan sebagian konsumen beralih dari premium ke Pertamina (BBM non subsidi). Dampak Kebijakan Penyesuaian Harga Premi Alternatif dengan Transfer Tunai/Bantuan Langsung Tunai (*Cash Transfer*). Pada bagian ini akan dilakukan simulasi kebijakan yang sama yaitu penyesuaian harga premium, namun kali ini kebijakan tersebut akan dibarengi dengan pemberian bantuan langsung tunai atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga. Pemberian BLT bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin terhadap dampak kenaikan harga BBM. Diharapkan pemberian BLT secara tepat sasaran mampu menjaga tingkat konsumsi dan mencegah penurunan kesejahteraan mereka melihat pemberian BLT ternyata

mampu memitigasi dampak negatif kenaikan harga premium terhadap konsumsi rumah tangga. Walaupun tidak dapat sepenuhnya mengurangi dampak negatif secara keseluruhan, kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi distribusi pendapatan karena rumah tangga miskin dapat menjaga tingkat konsumsinya.

Kebijakan penyesuaian harga premium dapat dilakukan dengan mempertimbangkan trade off antara penghematan subsidi yang diperoleh pemerintah dengan kinerja ekonomi makro. Satu kuartal setelah kebijakan itu diterapkan, dampaknya terhadap PDB terpangkas dalam kisaran yang tidak terlalu besar. Di sisi lain, kebijakan ini mampu menghasilkan penghematan subsidi masing-masing sebesar Rp14,1 triliun, Rp19,2 triliun, Rp22,8 triliun, Rp24 triliun, Rp10,5 triliun, Rp17,8 triliun dan Rp25,66 triliun (penghematan subsidi Q4 - 2014).

Penurunan konsumsi rumah tangga perlu menjadi perhatian utama pemerintah dalam menerapkan kebijakan penyesuaian harga premium. Hal ini karena konsumsi rumah tangga mengalami penurunan yang relatif besar sebagai dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan tersebut. Dampak langsung berasal dari kenaikan harga komoditas, sedangkan dampak tidak langsung berasal dari penurunan pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income). Pemberian BLT sebesar 50% dari penghematan beban subsidi BBM dan diberikan kepada kelompok rumah tangga miskin mampu meredam dampak negatif kenaikan harga premium terhadap konsumsi rumah tangga. Dengan pemberian BLT, laju penurunan konsumsi jangka pendek dapat ditekan. Pemberian BLT mampu menekan laju perlambatan konsumsi dalam jangka pendek sebesar 0,24%.

Mekanisme subsidi tetap Premium patut dipertimbangkan. Dalam kebijakan subsidi tetap yang coba diterapkan yaitu Rp3.000/liter dan Rp2.000/liter, penyesuaian harga konsumen Premium dilakukan setiap triwulan sesuai dengan perkembangan

harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Hal ini berdampak pada perubahan harga Premium ke konsumsi rumah tangga menjadi lebih lancar (smooth), sehingga dalam jangka panjang dapat meredam guncangan pada rumah tangga akibat penyesuaian harga Premium. Selain itu, subsidi tetap dapat mengurangi jumlah subsidi yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Subsidi yang dibayarkan pemerintah ini bergantung pada nilai tukar rupiah dan harga minyak internasional yang fluktuatif. Dalam lima tahun terakhir, rupiah rata-rata melemah hampir 7% per tahun, sementara harga minyak dunia naik rata-rata lebih dari 4% per tahun. Dengan menggunakan mekanisme subsidi tetap, risiko kenaikan harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah dapat dialihkan kepada konsumen dan/atau produsen dan tidak ditanggung oleh pemerintah semata-mata dalam bentuk peningkatan belanja subsidi BBM.

Kenaikan harga premium juga akan memiliki efek substitusi, sampai batas tertentu konsumen beralih dari Premium ke Pertamina (BBM non subsidi). Ini karena jangkauan harga antara Premium dan Pertamina lebih dekat setelah dilakukan penyesuaian harga. Semakin besar kenaikan harga premium, semakin banyak konsumen yang akan beralih. Hal ini cukup menggembirakan, mengingat semakin banyak konsumen yang beralih ke Pertamina, akan meringankan beban subsidi pemerintah.

2. Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah juga harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan pemerintah nasional. Sementara itu, negara

masih menghadapi risiko Covid-19 dan risiko lain yang mengancam stabilitas kawasan, serta implikasi perang Rusia-Ukraina. Sehingga dibutuhkan kebersamaan pemerintah pusat dan daerah secara bersama-sama untuk mengantisipasi inflasi, dan mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM.

Provinsi Jawa Timur 7.724 Desa 777 Kecamatan dengan 666 Kecamatan 29 Kabupaten 9 Kota dengan luas 47.803,49 km². Khofifah Indar Parawansa menyatakan eksistensi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur merealisasikan dana APBD untuk perlindungan sosial. Pemerintah Daerah Jawa Timur mengucurkan dana sebesar Rp. 257 miliar sebagai antisipasi dampak kenaikan harga BBM⁸. Hal ini untuk mengantisipasi inflasi yang dikhawatirkan melemahkan daya beli masyarakat. Dalam mewujudkan optimisme Jatim Bangkit, ada beberapa hal yang harus diwujudkan dalam rangka membangun komitmen dan program aksi bersama, sehingga dapat mempercepat pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk proteksi ekonomi dan proteksi sosial.

Skema pembiayaan yang dikucurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim total Rp 257 miliar. Total anggaran tersebar di banyak program. Berbagai program perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial diluncurkan untuk memperkuat sektor-sektor yang terkena dampak kenaikan harga BBM.

**TABEL1. PROGRAM OPTIMISME
JATIM BANGKIT.**

N O	PROGRAM	OBYEK TERDAMPA K	JUMLA H Rp
1	Asistensi sosial penyandang	4 ribu orang sasaran Rp600 ribu per orang	2,4 Miliar.

⁸Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur hasil rapat paripurna DPRD Jatim tentang pengesahan atau persetujuan bersama Perubahan APBD Jatim

antara pimpinan DPRD dengan Gubernur Jatim di kantor DPRD Jatim, Kamis, 15/9/2022..

	disabilitas (ASPD)		
2	Pengemudi/ojek konvensional	24.271 orang Rp600 ribu per orang	14,562 miliar.
3	Pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB)	34.917 angkutan umum terutama angkot	64,147 miliar.
4	Pelaku usaha mikro	30 ribu orang Rp600 ribu per orang	18 miliar.
5	Nelayan	20.770, orang Rp600 ribu per orang	12,462 miliar.
6	Sektor pangan	menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat	17,7 miliar
7	Pekarangan pangan lestari berupa paket hidroponik, benih bibit hortikultura dan kolam lele untuk 100 kelompok	5 ribu rumah tangga masing-masing penerima mendapatkan Rp30 juta,	3 miliar
8	Pasar Pangan Murah	20 Lokasi	600 juta
	sektor transportasi	subsidi angkutan kapal perintis subsidi penumpang Bus Trans Jatim	15 Miliar 9 miliar.
9	sosial reguler berupa program keluarga	40.000 keluarga	80 miliar.

	harapan (PKH) plus		
--	---------------------------	--	--

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat digambarkan bahwa secara rinci program perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial yang dicanangkan memperkuat sektor-sektor yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Rinciannya terdiri dari pemberian bantuan “top up” kepada penerima manfaat:

1. Program bantuan (asistensi) sosial bagi penyandang disabilitas (ASPD) sebesar Rp600 ribu per orang untuk 4 ribu orang sasaran dengan total bantuan Rp2,4 miliar.
2. Program bantuan sosial untuk 24.271 pengemudi/ ojek konvensional dan online dengan total nilai bantuan Rp 600 ribu yang totalnya Rp 14,562 miliar.
3. Program pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk 34.917 angkutan umum, khususnya angkutan umum, dengan total anggaran Rp64,147 miliar.
4. Pemprov Jatim juga memberikan program bantuan sosial kepada 30.000 pengusaha mikro yang masing-masing menerima Rp 600.000, sehingga totalnya menjadi Rp18 miliar.
5. Program selanjutnya memberikan bantuan sosial kepada sebanyak 20.770 nelayan yang masing-masing menerima Rp. 600 ribu, dengan total anggaran Rp. 12,462 miliar.
6. Dalam rangka mengantisipasi inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim menyelenggarakan Lumbung Pangan dan Operasi Pasar Jatim di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat, dengan total anggaran Rp17,7 miliar.
7. Untuk program bidang pertanian, Pemprov Jatim menyalurkan bantuan program kebun pangan lestari berupa paket hidroponik, bibit hortikultura dan

kolam lele untuk 100 kelompok yang berjumlah 5 ribu KK. Setiap penerima menerima Rp 30 juta, dengan total bantuan Rp3 miliar.

8. Program penyelenggaraan Pasar Pangan Murah di 20 Lokasi, dengan total anggaran Rp 600 juta.
9. Program khusus untuk sektor transportasi akan diberikan subsidi angkutan kapal perintis sebesar Rp15 miliar. Selain itu, subsidi untuk penumpang bus Trans Jawa Timur senilai Rp 9 miliar juga akan diberikan.
10. Program selanjutnya adalah bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) plus kepada sebanyak 40.000 KK dengan total nilai Rp 80 miliar.
11. Program Optimis Jawa Timur Bangkit lainnya adalah dalam pengentasan kemiskinan, melalui sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah serta meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil. Selain untuk meningkatkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat desa, serta mendukung sistem PKH plus.

KESIMPULAN

Dalam mewujudkan optimisme Jatim Bangkit, ada beberapa hal yang harus diwujudkan dalam rangka membangun komitmen dan program aksi bersama, sehingga dapat menyegarkan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk proteksi ekonomi dan proteksi sosial. Skema pembiayaan yang dikururkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim total Rp 257 miliar. Total anggaran tersebar di banyak program. Gerakan Optimisme Bangkit Jatim berupa program perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial dapat mengakomodir dampak kenaikan harga BBM dan kondisi Provinsi Jawa Timur menjadi kondusif dan memiliki ketahanan (*resilience*) dalam menghadapi: *Pertama*, dampak penurunan daya beli khususnya masyarakat miskin

dalam menghadapi masalah arus kas (cash flow) jangka pendek akibat pendapatan (income effect) yang secara riil menurun. *Kedua*, kenaikan harga BBM akan meningkatkan harga kebutuhan pokok lainnya yang akan membebani proses pemulihan ekonomi dan dampak Covid 19 bagi masyarakat menengah ke bawah. *Ketiga*, aspek sosial masyarakat berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan karena BBM merupakan bahan pokok operasional perusahaan, membebani biaya produksi, yang berimplikasi pada efisiensi yang berujung pada PHK.

Sementara itu, Pemerintah Pusat memfokuskan kembali pajak dalam bentuk pengurangan atau pembebasan pajak (*tax relaxation*) terkait masalah perpajakan dan ketersediaan dana dalam negeri untuk membiayai pembangunan dan kenaikan harga BBM yang bertujuan untuk mengantisipasi inflasi yang akan menimbulkan krisis ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Damayanti, Theresia Woro dan Supramono. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Salatiga: Andi.
- Kementerian Keuangan RI, Buku II Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2022.
- Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur hasil rapat paripurna DPRD Jatim tentang pengesahan atau persetujuan bersama Perubahan APBD Jatim antara pimpinan DPRD dengan Gubernur Jatim di kantor DPRD Jatim, Kamis, 15/9/2022.
- Laksanawan, Irnanda. "Urgensinya Strategi Kebijakan BBM yang Terintegrasi", *Media Indonesia*, 5 April 2022, hlm. 6.
- Mangkoesebroto, G. (1994). *Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi*. Jakarta: Gramedia

Pustaka. Williams, W. 1971. *Social Policy Research and Analysis*. American Elswier Publishing Company, New York, USA, and Weimer, D.L. and A.R. Vining. 1989. *Policy Analysis: Concept and Practice*. Prentice Hall Inc. Englewoods, J.J., USA.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah juga harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan pemerintah nasional.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022